BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat memberi gambaran kondisi keuangan daerah dan digunakan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tingkat kemampuan pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dianalisis dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kinerja keuangan masa lalu terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD, neraca daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Arah Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2006 - 2011 berorientasi pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan Belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian sudah semestinya penganggaran tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi seta efektifitas.

Sejalan dengan Kebijakan otonomi daerah, melalui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006 - 2011 maka kebutuhan APBD lebih diorientasikan pada upaya, 1) Penanggulangan kemiskinan; 2) Peningkatan aksesibilitas dan pendidikan dan kesehatan; 3) Revitalisasi pertanian; 4) Pembangunan infrastruktur.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berarti adanya perubahan paradigma tentang pengelolaan keuangan daerah dari berbasis Tradisional menjadi berbasis Kinerja.

3.1.1 Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum APBD Propinsi Sulawesi Barat diarahkan kepada : 1) Peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien, 2) Perluasan Potensi objek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan 3) Peningkatan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberi dampak untuk peningkatan pendapatan daerah yang perlu ditunjang dengan pengembangan sistem administrasi, sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai agar semua unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan terintegrasi, serta dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang sangat berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Kebijakan pemerintah, (b) Pendapatan masyarakat, c)Fluktuasi harga komoditas andalan, dan (d) Kondisi daerah yang cukup aman.

Diawal masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2006 realisasi pendapatan daerah menunjukkan angka yang cukup baik, dengan angka perolehan Rp.325.557.827.302,79,-. Melampaui target yang ditetapkan. Di Tahun Anggaran 2007 realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp. 40.210.393.573,18 atau naik 12,00 persen, sehingga realisasi pendapatan daerah menjadi Rp. 365.768.220.875,97.

Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2008 mencapai angka Rp.510.759.424.956,00,- ini berarti mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp.144.991.204.080,03 dari realisasi pendapatan pada tahun 2007 yaitu: Rp.365.768.220.875,97. atau naik sebesar 39,64 persen. Peningkatan ini disebabkan karena semakin berkembangnya sistem pemerintahan yang berjalan di tahun 2008. Perkembangan pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat, di tahun 2009 jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 554.240.279.732,41 dan ini tentu saja

merupakan suatu prestasi yang cukup baik, dimana pendapatan daerah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.480.854.776,41 atau naik sebesar 8,51 persen.

Jika dilihat dari tahun ke tahun maka realisasi pendapatan daerah yang di capai oleh Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan. Dibandingkan diawal tahun terbentuknya pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yaitu tahun 2006, maka di tahun 2010 jumlah realisasi pendapatan yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat mengalami lonjakan yang sangat pesat. Pada tahun 2006 jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.325.557.827.302,79 dan di tahun 2010 Rp. 610.378.109.666,68 ini berarti kenaikan pendapatan daerah yang dicapai selama lima tahun terakhir naik 87,49 persen. Berikut gambaran pendapatan kurun waktu 2006 s.d 2011.

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2006-2011

SUMBER PENDAPATAN	REALISASI					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Pendapatan Asli Daerah	35.390.236.946,79	47.056.499.124,57	61.855.624.494,00	64.444.721.931,00	90.207.581.462,68	114.360.494.837,00
Dana Perimbangan	283.882.465.516,00	304.795.786.751,40	432.964.938.438,00	482.372.728.801,00	520.170.528.134,00	604.542.098.280,00
Pendapatan lain-lain Yg Sah	6.285.124.840,00	13.915.935.000,00	15.938.862.024,00	7.422.829.000,00	70,00	18.081.143 ,00
TOTAL =	**325.557.827.302,79**	**365.768.220.875,97**	**510.759.424.956,00**	**554.240.279.732,00**	**610.378.109.666,68**	**718.920.674.260,04**

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011
(Catatan : Nilai yang tertulis pada tahun 2011 adalah nilai sebelum Audit)

Trend pendapatan Tahun 2006 s.d 2011, menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, Tahun 2006 terealisasi Rp. 325.557.827.302,79 target Tahun 2007 terealisasi Rp. 365.768.220.875,97, Tahun 2008 terealisasi Rp. 510.759.424.956,00 target Tahun 2009 terealisasi Rp. 554.240.279.732,41 target Tahun 2010 terealisasi Rp. 610.378.109.666,68 dan tahun 2011* terealisasi Rp. 718.920.674.260,04. Trend peningkatan pendapatan ini mengisyaratkan bahwa sumber- sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendapatan bagi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi PAD pada APBD Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2006-2011

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektifitas
	PAD	Growth (%)	PAD	Growth (%)	
2006	30.833.800.000,00	-	35.390.236.946,79	-	114,78
2007	40.313.234.500,00	30,74	47.056.499.124,57	32,96	116,73
2008	52.530.600.000,00	30,31	61.855.624.494,00	31,45	117,75
2009	67.200.000.000,00	27,93	64.444.721.931,41	4,19	95,90
2010	95.955.401.571.00	42,79	90.207.581.462,68	39,98	94,01
2011*	103.547.078.973,25	7,91	114.360.494.837,04	26,77	110,44
Rata Per Tahun		**27,94**		**22,56**	

Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu tahun anggaran 2006-2011 menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 27,94 persen. Demikian juga rata-rata realisasi pendapatan dicapai sebesar 22,56 persen melebihi rata-rata target yang telah ditetapkan dengan demikian rasio efektifitas PAD mencapai 94,00 persen sampai 117,75 persen. Dengan demikian maka Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup efektif untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu masih banyak potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber-sumber pendapatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD sehingga pendapatan Provinsi Sulawesi Barat dapat lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2011

No.	Uraian	2006 (Rp.)	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**325.557.827.302,79**	**331.086.880.000,00**	**539.477.314.777,00**	**579.490.164.475,00**	**603.132.709.364,74**	**19,03**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**35.390.236.946,79**	**47.056.499.124,00**	**61.855.624.494,00**	**64.444.721.931,00**	**90.207.581.463,00**	**29,09**
1.1.1	Pajak daerah	30.697.909.928,00	42.092.619.124,00	51.497.524.494,00	54.388.067.456,00	73.581.616.463,00	**27,38**
1.1.2	Retribusi daerah	659.882.130,00	785.000.000,00	1.074.830.000,00	1.371.500.000,00	3.317.470.000,00	**56,34**
1.1.3	Hasil pengelolan keuangan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2006 (Rp.)	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	4.032.444.888,79	4.178.880.000,00	9.283.270.000,00	8.685.154.475,00	13.308.495.000,00	**43,14**
1.2.2	Dana alokasi umum	255.207.000.000,00	279.253.000.000,00	366.674.670.000,00	391.060.510.000,00	405.749.577.000,00	**12,78**
1.2.3	Dana alokasi khusus	10.000.000.000,00	-	45.738.000.000,00	66.053.000.000,00	17.532.000.000,00	**(14,52)**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**6.285.124.840,00**	**-**	**56.535.400.000,00**	**29.594.000.000,00**	**46.890.497.397,74**	**5,40**
1.3.1	Hibah	-	-	34.000.000.000,00	6.411.000.000,00	11.117.500.000,00	**(3,87)**
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya***)	-	-	-	-	3.577.299.739.774,00	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	1.158.400.000,00	-	-	-
1	**PENDAPATAN**	**325.557.827.302,79**	**331.086.880.000,00**	**539.477.314.777,00**	**579.490.164.475,00**	**603.132.709.364,74**	**19,03**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**35.390.236.946,79**	**39.033.880.000,00**	**52.530.600.000,00**	**64.642.654.475,00**	**95.955.401.571,00**	**29,09**
1.1.1	Pajak daerah	30.697.909.928,00	34.070.000.000,00	42.172.500.000,00	54.586.000.000,00	79.329.436.571,00	**27,38**
1.1.2	Retribusi daerah	659.882.130,00	785.000.000,00	1.074.830.000,00	1.371.500.000,00	3.317.470.000,00	**56,34**
1.1.3	Hasil pengelolan keuangan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	4.032.444.888,79	4.178.880.000,00	9.283.270.000,00	8.685.154.475,00	13.308.495.000,00	**43,14**
1.2.2	Dana alokasi umum	255.207.000.000,00	279.253.000.000,00	366.674.670.000,00	391.060.510.000,00	405.749.577.000,00	**12,78**
1.2.3	Dana alokasi khusus	10.000.000.000,00	-	45.738.000.000,00	66.053.000.000,00	17.532.000.000,00	**(14,52)**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**6.285.124.840,00**	**-**	**56.535.400.000,00**	**29.594.000.000,00**	**46.890.497.397,74**	**5,40**
1.3.1	Hibah	-	-	34.000.000.000,00	6.411.000.000,00	11.117.500.000,00	**(3,87)**
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2006 (Rp.)	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya***)	-	-	-	-	3.577.299.739.774,00	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	1.158.400.000,00	-	-	-

Sumber: *Biro Keuangan Setda Prov. Sulbar*

Pertumbuhan rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2006-2010 memperlihatkan kelompok PAD mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 19,09 persen yang terdiri dari pajak daerah tumbuh positif 27,38 persen, retribusi daerah tumbuh positif 56,34 persen dan lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 43,14 persen.

Kondisi ini menggambarkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan cukup efektif sehingga mampu memberikan pertumbuhan rata-rata yang positif.

Kelompok Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata positif sebesar 24,25 persen, Dana Alokasi Khusus (DAU) mengalami pertumbuhan rata-rata yang positif sebesar 12,78 walaupun Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pertumbuhan rata-rata negatif sebesar 14,52 persen secara keseluruhan kelompok dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata yang positif sebesar 14,46 persen.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata yang Fositif sebesar 5,40 persen.

3.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2006-2010

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama periode Tahun 2008–2010 yang meliputi: penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Derah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam kurun tahun 2006 s.d 2010 Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat diperuntuhkan kepada belanja publik yang langsung menyentuh kepada masyarakat kecil yaitu Belanja Langsung yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan kebijakan alokasi Belanja Tidak Langsung diarahkan pada :

1. Peningkatan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien melalui peningkatan kemampuan motivasi, disiplin, etos kerja dan mobilitas aparatur daerah
2. Mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menunjang tugas-tugas kepemerintahan
3. Memfasilitasi pemerintah kabupaten dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan daerah
4. Penanganan berbagai kejadian

Alokasi Belanja Langsung berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah merupakan kelompok belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek multi player yang lebih besar dan merangsang pihak swasta untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, terutama para pemilik modal didaerah sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah secara produktif atau alokasi belanja langsung merupakan anggaran belanja daerah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

Tabel 3.4.
Realisasi Belanja dan Proporsi Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Barat
Untuk Tahun 2006 – 2010

LANDSCAPE

Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 s/d 2010 diarahkan pada program dan kegiatan prioritas. Untuk Tahun 2006 realisasi total belanja sebesar Rp.273,533,117,337 yang di alokasikan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.115,902,326,130 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 157,630,791,207,-, pada Tahun 2007 realisasi total belanja sebesar Rp. 314,004,776,601 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 80,837,706,677 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 233,167,069,924.- , Tahun 2008 realisasi total belanja Rp. 515,817,407,423 yang di alokasikan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 103,504,356,733 dengan Belanja Langsung sebesar Rp. 412,313,050,690,- Tahun 2009 realisasi total belanja Rp. 590,163,811,677 yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 103,782,680,450,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 486,381,131,227 dan realisasi total belanja pada tahun 2010 sebesar Rp. 578,409,200,257 yang di lokasikan pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 96,375,686,432,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 482,033,513,825,-. Proporsi capaian realisasi APBD dari anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010 berkisar 81-91 persen artinya capaian realisasi ini msih dikategorikan baik.

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2006 – 2011

Pembiayaan daerah 2006 – 2011 terdiri dari sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Penerimaan Daerah meliputi sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, dan Transfer dari Dana Cadangan. Sedangkan Sumber Pengeluaran Daerah meliputi Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

Tabel 3.5.
Pembiayaan Daerah Tahun 2006-2010

TAHUN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	SURPLUS (DEFISIT)	SILPA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2006	22,250,898,903.65	74,025,608,624.44	51,774,709,720.79	-
2007	74,941,514,275.44	5,614,197,952.67	1,763,444,275.22	71,090,761,597.99
2008	70,248,927,972.24	824,025,000.00	(9,430,347,217.00)	54,994,555,755.24
2009	59,884,224,801.24	739,663,239.00	(35,923,531,944.88)	23,221,024,617.36
2010	23,221,029,617.36	175,520,601.00	2,705,943,854.68	25,751,452,871.04

Realisasi Pembiayaan Daerah 2006 – 2011 adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun 2006 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah sebesar Rp. 22.250.898.903,65,- sedangkan yang bersumber dari Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 74.025.608.624,44
b. Pada tahun 2007 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah sebesar Rp.74.941.514.275,44, sedangkan yang bersumber dari Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 5.614.197.952,67.
c. Pada tahun 2008 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah sebesar Rp. 70.248.927.972,24 sedangkan yang bersumber dari Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 824.025.000,-.
d. Pada tahun 2009 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah sebesar Rp. 59.884.224.801,24, sedangkan yang bersumber dari Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 739.663.239,-.
e. Pada tahun 2010 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah sebesar Rp. 23.221.029.617,36, sedangkan yang bersumber dari Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 175.520.601,-.

3.1.4 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan sumber informasi kepada manajemen pemerintah daerah mengenai likuiditas keuangan daerah yang memberikan informasi mengenai posisi keuanngan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana. Hal ini dimaksudkan guna mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance).* Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyusun sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Tabel 3.6.
Neraca Daerah Tahun 2009- 2010

No.	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Pertumbuhan 2010 atas 2009	
				Rupiah	%
1	**ASSET**				
	ASSET LANCAR				
	Kas				
	Kas di Kas Daerah	12.644.909.835,36	20.767.184.175,04	8.122.274.339,68	64,23
	Kas di Bendahara Penerimaan	68.768.000,00	-	(68.768.000,00)	(100)
	Kas di Bendahara Pengeluaran	11.793.963.825,00	6.171.670.875,00	(5.622.292.950,00)	(47,67)
	Investasi	-	-	-	-
	Piutang			-	-
	Piutang Pajak	563.731.400,00	633.648.484,00	69.917.084,00	12,40
	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	440.378.660,00	440.378.660,00	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	1.092.124.695,00	1.092.124.695,00	-
	Piutang Lain-lain	3.936.162.490,00	3.684.741.577,00	(251.420.913,00)	(6,39)
	Persedian	1.670.375.679,00	1.505.460.642,00	(164.915.037,00)	(9,87)
	Jumlah Aset Lancar	**30.677.911.229,36**	**34.295.209.108,04**	**3.617.297.878,68**	**11,79**
	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Non Permanen				
	Investasi Dana Bergulir	1.517.775.000,00	1.517.775.000,00	-	-
	Investasi Permanen	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.517.775.000,00	1.517.775.000,00	-	-
	DANA CADANGAN				
	Dana Cadangan	-	-	-	
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	
	ASET TETAP			-	
	Tanah	165.915.100.776,30	124.029.628.329,00	(41.885.472.447,30)	(25,25)
	Peralatan dan Mesin	204.744.256.253,86	165.765.713.188,83	(38.978.543.065,03)	(19,04)
	Bangunan dan Gedung	119.130.018.807,29	91.203.909.603,00	(27.926.109.204,29)	(23,44)
	Jalan Irigasi dan Jaringan	463.345.307.915,56	308.142.804.843,00	(155.202.503.072,56)	(33,50)
	Aset Tetap Lainnya	21.637.830.263,99	6.695.355.599,00	(14.942.474.664,99)	(96,06)
	Konstruksi dalam pengerjaan	119.661.610.839,00	96.423.397.012,00	(23.238.213.827,00)	(19,42)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(20.570.871.883,33)	(20.570.871.883,33)	-
	Jumlah Aset Tetap	**1.094.434.124.856,00**	**771.689.936.691,50**	**(322.744.188.164,50)**	**(29,49)**

No.	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Pertumbuhan 2010 atas 2009	
				Rupiah	%
	ASET LAINNYA			-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-
	Aset Lain-lain	33.511.447.470,24	-	(33.511.447.470,24)	-
	Jumlah Aset Lainnya	**33.511.447.470,24**		**(33.511.447.470,24)**	
	JUMLAH ASET	1.127.945.572.326,24	771.689.936.691,50	(356.255.635.634,74)	**(29,49)**
	KEWAJIBAN			-	
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			-	
	Utang Pihak Ketiga	-	-	-	
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.217.844.043,00	1.187.402.179,00	(30.441.864,00)	2,50
	utang Dana Bagi Hasil	7.067.844.458,00	7.067.844.458,00	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.285.688.501,00	8.255.246.637,00	(30.441.864,00)	(0,37)
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			-	
	Utang Dalam Negeri	-	-	-	
	Utang Luar Negeri	-	-	-	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	**8.285.688.501,00**	**8.255.246.637,00**	**(30.441.864,00)**	**(0,37)**
	EKUITAS DANA			-	
	Ekuitas Dana Lancar			-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	23.221.029.617,36	25.751.452.871,04	2.530.423.253,68	10,90
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	68.768.000,00	-	(68.768.000,00)	-
	Cadangan Piutang	4.499.893.890,00	5.850.893.416,00	1.350.999.526,00	30,02
	Cadangan Persediaan	1.670.375.679,00	1.505.460.642,00	(164.915.037,00)	(9,87)
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(7.067.844.458,00)	(7.067.844.458,00)	-	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**22.392.222.728,36**	**26.039.962.471,04**	**3.647.739.742,68**	**16,29**

No.	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Pertumbuhan 2010 atas 2009	
				Rupiah	%
	Ekuitas Dana Investasi			-	-
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.517.775.000,00	1.517.775.000,00	-	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.094.434.124.856,00	771.689.936.691,50	(322.744.188.164,50)	(29,49)
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	33.511.447.470,24	-	(33.511.447.470,24)	
	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.129.463.347.326,24	773.207.711.691,50	(356.255.635.634,74)	(31,54)
	Ekuitas Dana Cadangan			-	
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.137.749.035.827,24	781.462.958.328,50	(356.286.077.498,74)	(31,31)
				-	

Sumber : *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010*

Berdasarkan informasi Neraca Daerah pada Tabel 3.7, aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Selama kurun waktu 2009-2010 atau dua periode akuntansi, pertumbuhan jumlah aset lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencapai 11,79 % yang berarti jumlah pertumbuhan aset lancar sebesar Rp. 3.617.297.878,68 selama periode akuntansi Tahun Anggaran 2010.

Aset tetap Tahun Anggaran 2010 nampak mengalami penurunan sebesar 29,49 persen atau senilai Rp. 322.744.188.164,50 dibandingkan tahun anggaran 2009. Kondisi ini diakibatkan, adanya beberapa penyesuaian nilai aset dan pemisahan nilai aset Pemerintah (APBN) dengan aset Pemerintah Daerah (APBD). Dari hasil perhitungan tersebut, maka tampak terlihat adanya penurunan Aset tetap dari Rp. 1.094.434.124.856 tahun anggaran 2009 menjadi Rp. 771.689.936.691,50 pada tahun anggaran 2010. Pengadaan asset tetap pada tahun anggaran 2010 secara total meningkat senilai Rp. 151.058.417.688,31 dalam bentuk sarana dan prasarana

pembangunan di Sulawesi Barat.

Ekuitas dana lancar melalui peningkatan dari Tahun anggaran 2009 sampai Tahun anggaran 2010. Pada tahun anggaran 2009 nilai ekuitas dana lancar Rp. 22.392.222.728,36 tahun anggaran 2010 mengalami kenaikan 16,29 persen atau meningkat senilai Rp. 3.647.739.742,68.

Ekuitas dana investasi pada tahun anggaran 2009 sampai tahun anggaran 2010 mengalami penurunan dari Rp. 1.129.463.347.326,24 menjadi Rp. 773.207.711.691,50 pada tahun anggaran 2010, penurunan ekuitas dana investasi ini diakibatkan adanya penyesuaian dan pemisahan aset yang dilakukan pada tahun anggaran 2010.

Saldo piutang mengalami peningkatan sebesar 30,02 persen hal ini disebabkan karena adanya kenaikan komponen pajak sebesar 12,40 persen. Bagian lancar tuntutan berbendaharaan senilai Rp. 440.378.660 yang pada Tahun 2009 tidak ada dan bagian lancar tuntutan ganti rugi senilai Rp. 1.092.124.695 yang pada tahun sebelumnya atau tahun 2009 tidak ada.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar *(current ratio)*, rasio kas *(cash ratio)* dan rasio cepat *(quick ratio)*. Sedangkan rasio lancar *(current ratio)* adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Aset lancar Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil analisis rasio menunjukkan bahwa current ratio Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu Tahun 2009-2010 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Current ratio pada Tahun 2010 mencapai 415,43 persen yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah 4 kali lipat lebih bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Tabel 3.7.
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2006-2009

NO	Uraian	2009 (%-hari)	2010 (%-hari)
1.	Rasio lancar (*current ratio*)	370,25	415,43
2.	Rasio quick (*quick ratio*)	364,47	397,20
3.	Rasio total hutang terhadap total asset	13613,17	9347,87

Sumber : *Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2009-2010*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai rasio lancar (quick ratio) mencapai 346,47 persen pada Tahun 2009 dan pada tahun 2010 quick rationya 397,20 persen, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu yang singkat karena persentasi ratio lancar adalah merupakan satu ukuran likuiditas keuangan terbaik, untuk rasio solvabilitas Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 9347, 87 persen. Hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena menghitung rasio solvabilitas yaitu perbandingan total aset dengan total utang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka secara umum struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2010 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan daerah, dikelompokkan kepada :
   1) Pendapatan Asli daerah
   2) Dana Perimbangan (Tahun 2008-2009) Pendapatan transfer (Tahun 2010)
   3) Lain-lain Pendapatan yag sah
2. Belanja, dikelompokkan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung.
   1) Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program kegiatan; belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
   2) Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan ; belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

3. Pembiayaan, meliputi :
   1) Penerimaan pembiayaan daerah
   2) Pengeluaran pembiayaan daerah

   Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011, permasalahan pokok yang menjadi prioritas penanganan yaitu :

   a. Masih besarnya jumlah penduduk miskin
   b. Rendahnya kesempatan kerja, minat investasi dan interkoneksitas
   c. Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat relatif masih rendah
   d. Pengelolaan potensi sumberdaya alam secara optimal
   e. Dukungan infrastruktur belum memadai
   f. Kesenjangan antara wilayah masih besar
   g. Penegakan hukum masyarakat masih lemah
   h. Masih rentannya mitigasi bencana
   i. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak konflik

Kebutuhan APBD lebih diorientasikan pada upaya :

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah serta penciptaan keamanan
3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar
4. Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi
5. Revitalisasi pertanian, perikanan kelautan dan perdesaan
6. Penegakan hukum dan HAM
7. Mitigasi dan penanggulangan bencana
8. Pemantapan ketertiban dan keamanan masyarakat

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut : Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan perkiraan pertumbuhan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah Sulawesi Barat memperhatikan azas perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat meliputi peningkatan pendapatan melalui intensifikasi pengelolaan pendapatan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memberi kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi, upaya tersebut ditempuh dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi target pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komponen Pendapatan Asli Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai pendapatan Provinsi terdiri dari: Pajak Daerah dengan jenis-jenis penerimaan masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air dan Pajak Air Permukaan.Dari jenis-jenis pajak provinsi tersebut di atas, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah ”primadona” penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan memberi kontribusi kurang lebih 60 persen dari total Pendapatan Asli Daerah setiap Tahun Anggaran.

3.2.3. Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak melalui peningkatan perubahan plat kendaraan bermotor non DC ke DC.

Di samping itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui Penarikan Berkas Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat ke dalam Wilayah Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Sulawesi Barat.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berupaya melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui peningkatan ketersediaan data dan peningkatan mutu pelayanan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalian dan pendataan obyek pajak dan retribusi dan belum terjaring/belum digali yang dimungkinkan dapat dikenai pajak serta didukung dengan peraturan daerah.

3.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah sebagai pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dituangkan dalam klasifikasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program kegiatan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diarahkan kepada upaya penghematan penggunaan anggaran melalui efisiensi dan efektifitas atas kegiatan-kegiatan tertentu dengan memperhatikan:

1. Rencana alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan kewajaran biaya serta keterkaitan output dari suatu kegiatan untuk menghindari pemborosan.
2. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja barang dan jasa. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan batasan jumlah belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik.

3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk Provinsi Sulawesi Barat di dalam pengalokasian belanja aparatur dan publik adalah biaya pegawai lebih kecil prosentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Proporsi Belanja APBD
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Persen (%)
1	Tahun Anggaran 2008	Rp. 107.876.721.483,-	Rp. 412.313.050.690,00	26,16
2	Tahun Anggaran 2009	Rp. 103.782.680.450,-	Rp. 486.381.131.227,29	21,34
3	Tahun Anggaran 2010	Rp. 125.638.651.987,-	Rp.482.033.513.825,00	26,06
	Jumlah =	**Rp. 520.189.772.173,-**	**Rp. 590.163.811.677,00**	**88,14**

Sumber : Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

3.2.6. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun Tahun 2008-2010 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.9 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa defisit riil anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2008 mencapai angka yang sangat besar yaitu sejumlah Rp.97.514.931.243,00 Kemudian menjadi Rp.73.033.177.862,96 pada Tahun 2009, pada Tahun 2010 Rp.51.497.664.415,54 dan menjadi Rp.51.720.478.316,68 pada tahun 2011.

Tabel 3.9.
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

No.	Uraian	2008 Rp.	2009 Rp.	2010 Rp.	2011 Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	510.759.424.956,-	554.240.279.732,41	610.378.109.666,68,	718.920.674.260,04
	Dikurangi realisasi				
2	Belanja daerah	520.189.772.173	990.163.811.677,29	607.672.165.812	731.174.415.692,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	824.025.000,-	739.663.239,00	175.520.601	-
	Surplus/Defisit riil	**(97.514.931.243,00)**	**(73.033.177.862,96)**	**(51.497.664.415,54)**	**(12.253.741.431,96)**

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Sulbar
(Catatan : Realisasi 2011 belum masuk audit)

Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	59.994.555.755	23.221.029.617,36	25.751.452.871,04
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	3.000.000
5.	Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	739.812.549	-	172.520.601

Sumber : *Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008-2010*

Berdasarkan data defisit rill anggaran dari Tahun 2008-2010 dengan SiLPA Tahun 2007-2009 terlihat bahwa angka SiLPA lebih besar dibandingkan dengan defisit rill anggaran. Hal ini berarti bahwa defisit rill dapat ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Sehingga data pada tabel 3.11 menunjukkan persentase SiLPA diatas 100 %.

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada Tahun 2008-2010, gambarannya seperti terlihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Provinsi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2010

No.	Uraian	2008		2009		2010	
		Rp	% Dari SILPA	Rp	% Dari SILPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SILPA	94.088.321.025,-		59.994.555.755,24		23.221.029.617,36	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	52.530.600.000,-	55,83	67.200.000.000,-	112,01	95.955.401.571,-	413,23
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	17.998.644.777,-	19,13	28.140.000.000,-	46,90	37.005.233.396,-	159,36
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	34.000.000.000,-	36,14	26.228.819.436,-	43,72	71.721.910.430,-	308,87

Sumber : *Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008-2010*

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SiLPA terjadi apabila pelampauan penerimaan PAD, pendapatan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pelampauan penerimaan pembiayaan, menghemat belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa kegiatan lanjutan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang memberikan kontribusi terhadap SiLPA yaitu pelampauan penerimaan PAD, pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja.

3.3 Kerangka Pendanaan

Sub bab ini akan dijelaskan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, terkait pembelanjaan pada kategori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan disampaikan dalam uraian sebelumnya

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat Provinsi Sulawesi Barat yang dibebankan pada keuangan daerah pada RPJMD Tahun 2009-2010 disusun, memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.12.
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	2009	2010	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**117.974.445.788,-**	**158.222.708.866,54**	34,12
1.	Belanja Pegawai	75.538.686.685,-	101.313.461.468,80	34,12
2.	Belanja Hibah	6.256.969.620,-	11.117.500.000,-	73,41
3.	Belanja Bantuan Sosial	12.841.760.093,-	10.018.750.000,-	(21,98)
4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa	23.183.000.000,-	35.772.997.397,74	54,31
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan	-	-	-
6.	Pemerintah Desa	4.000.000.000,-	2.000.000.000,-	(50,00)
B.	Belanja Tidak Terduga	**527.646.861.510,96**	**518.539.717.858,-**	(1,37)
1.	**Belanja Langsung**	54.797.221.200,-	62.021.872.035.-	12,92
2.	Belanja Pegawai	236.122.716.792,-	237.458.210.653,-	0,48
3.	Belanja Barang dan Jasa	236.726.923.518,-	219.059.635.170,-	(7,33)

1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.994.555.755,24	23.221.029.617,36	(61,29)
2.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
D.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**	**-**
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-

Sumber : *Biro Keuangan Setda Prov. Sulbar Tahun 2012*

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menyajikan pengelolaan keuangan daerah masa lalu yang dibuat hingga Tahun 2010, sebagai dasar keuangan yang telah ada dalam laporan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya akan dilihat kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga Tahun 2011 s.d 2016 mendatang.

Tabel 3.13.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2012-2016

LANDSCAPE

Dengan proyeksi kenaikan rata-rata sebesar 19,03 persen sesuai dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dari tahun 2006-2010, penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan Prov. Sulbar Tahun 2012-2016 menunjukkan pada Tahun 2011, kemampuan daerah sebesar Rp. 750.038.165.240,29 Tahun 2012 sebesar Rp.986.006.464.829,92- Tahun 2013 sebesar Rp. 1.256.933.216.250,- Tahun 2014 sebesar Rp. 1.659.180.599.062,- Tahun 2015 sebesar Rp. 1.712.124.856.671,- dan Tahun 2016 sebesar Rp. 1.862.531.490.379,- Kapasitas riil diperuntukkan untuk menunjang program prioritas I, prioritas II dan Prioritas III. Adapun rincian prioritas tersebut antara lain:

1. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas I, yang berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Selain itu program prioritas berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan pada capaian Visi/Misi Kepala Daerah Terpilih Prov. Sulbar 2011-2016. Selain itu, Prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, berkaitan dengan program ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran per urusan yang paling berdampak luas pada masyarakat yang dilayani sesuai permasalahan yang dihadapi, berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.
3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yang berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung :
   - Belanja pegawai,
   - Belanja hibah,
   - Belanja bantuan sosial,
   - Belanja bagi hasil kepada provinsi, Kabupaten dan pemerintah Desa,
   - Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa,
   - Belanja tidak terduga.

Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Tabel 3.14.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016

LANDSCAPE

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dipergunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, jika dilihat pada tabel 3.14 Proyeksi kapasitas rill keuangan daerah mengalami kenaikan, tetapi harus tetap memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Agar pemanfaatan dana efisien dan efektif, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan dua hal yaitu : (1) Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas, (2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara efektif.